



KORAN	HAL
Haluan	
Padang Ekspres	8
Singgalang	
Pos Metro	

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Ranperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Disempurnakan Bertujuan Tingkatkan SDM Sumbar

BPS merilis, penduduk miskin di Sumbar per Maret 2018 mencapai 357 ribu jiwa lebih (6,65%) dari 5,6 juta jiwa penduduk. Ini menjadi salah satu pemicu dibuat Perda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Nantinya perda ini meliputi, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan dan perlindungan sosial. Namun saat ini, Komisi V yang menjadi pembahasa ranperda ini melihat problem utama di antaranya validitas data penerima manfaat pada Basis Data Terpadu (BDT) yang belum valid. Artinya masih terdapat warga yang tidak patut menerima bantuan namun



Rafis

masih BDT begitu pun sebaliknya. Hal ini disampaikan Ketua Komisi V DPRD Sumbar Hidayat. Katanya, guna menghimpun saran, masukan dan informasi terkait penyusunan Ranperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilakukan berbagai kegiatan seperti seminar dan hearing.

Komis V DPRD Sumbar berharap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (PKS) bisa menjadi solusi untuk semua permasalahan sosial di Sumatera Barat. Untuk mencapai target itu tidaklah mudah.

Komis V berupaya meringkas semua pilak dari berbagai sektor agar ranperda itu nantinya benar-benar sesuai dengan kebutuhan untuk me-



KETUA DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim dan Ketua Komisi V Hidayat mendengarkan penjelasan terkait Ranperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

nyelesaian permasalahan tersebut. Selain juga menjadi solusi efektif yang benar-benar bisa menjadi solusi yang membuahkan hasil nyata.

Hidayat mengatakan, sampai sekarang Ranperda PKS tersebut masih dibahas oleh DPRD Sumbar. Namun diharapkan ranperda tersebut itu bisa selesai pertengahan tahun ini.

"Ranperda ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Sumbar. Berbagai permasalahan sosial harus segera diberikan solusi agar masyarakat bisa hidup lebih tenang tanpa kekhawatiran," ujar Hidayat.

Walaupun ranperda ini mendesak untuk segera ada sebagai regulasi dan payung hukum, Hidayat mengatakan, Komisi V tak ingin terburu-buru. Mengingat banyaknya permasalahan sosial yang akan diatur dalam ranperda tersebut.

"Permasalahan sosial sangat banyak. Cakupannya luas dan juga berkaitan dengan sektor-sektor. Jadi ketelitian harus ditunjukkan dalam menyusun ranperda ini," ujar Hidayat.



SUASANA seminar membahas Ranperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di DPRD Sumbar.

Selain itu, ranperda ini juga harus disusun dengan seksama mengingat nantinya regulasi yang diatur di dalamnya akan sangat berkaitan dalam kehidupan masyarakat. Hidayat memaparkan, beberapa di antaranya nanti akan mengatur tentang anak terlantar, panti jompo, lansia, wanita rawan sosial ekonomi, LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transgender). Selain juga mengatur berbagai hal lain yang juga terkait kehidupan sosial

masyarakat. Namun, terpenting sekali dalam ranperda ini akan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan di Sumatera Barat.

Untuk itulah, kata Hidayat, Komisi V saat ini benar-benar berupaya untuk menyusun ranperda tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terutama sekali ranperda ini

harus sesuai dan menjadi solusi untuk permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. "Melihat banyaknya hal yang akan diatur dalam ranperda ini, maka perlu ketelitian dan kajian yang benar-benar harus dilakukan menyeluruh," ujarnya.

Dalam menyusun ranperda ini Komisi V menggandeng banyak organisasi perangkat daerah (OPD). Untuk itulah, tambah Hidayat, beberapa waktu lalu Komisi V dan Pemprov



SEJUMLAH anggota Komisi V ikut membahas Ranperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.



SUASANA hearing Ranperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dilakukan Komisi V.

Sumbar sudah membentuk tim khusus untuk keperluan penyusunan ranperda ini. Tim perumus ini dikoordinir oleh DPRD. Di dalamnya ada pula perwakilan dari berbagai Dinas Sosial, Biro Hukum, Kementerian Hukum dan HAM. Selain juga perwakilan dari berbagai OPD lainnya.

Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim menjelaskan nantinya Perda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diproyeksikan akan mempercepat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Provinsi Sumbar yang berkualitas. Langkah tersebut dilakukan dengan program kerja yang lebih terarah, demi meningkatkan kesejahteraan umum. Sejumlah masukan yang

diberikan oleh narasumber di antaranya adalah, payung hukum yang dalam pembuatan Ranperda ini mesti diperjelas. Sehingga dapat menambah muatan-muatan lain yang dapat mengakomodir permasalahan sosial yang hadir di tengah-tengah masyarakat, penyesuaian substansi dengan naskah akademik menjadi acuan dalam muatan yang terkandung dalam Ranperda.

Dalam pembentukan Ranperda ini, masukan yang diberikan akan di koordinasikan dengan seluruh anggota DPRD. Perlu adanya anggota DPRD. Perlu adanya anggota DPRD untuk merubah paradigma dalam penyusunan regulasi, hal itu dikarenakan adanya proses percepatan perubahan Undang-undang. (***)